



Musyawarah Nasional Kesatu ADAKSI sebagai Upaya Strategis Peningkatan Kesejahteraan dan Profesionalisme Dosen ASN

ADAKSI's Inaugural National Congress as a Strategic Effort to Enhance the Welfare and Professionalism of Civil Servant Lecturers

Eliyah A M Sampetoding^{1*}, Harsi Admawati², Yulita Sirinti Pongtambing³, Jonris Tampubolon⁴, Esther Sanda Manapa⁵

^{1,5} Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

² Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

³ Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

⁴ Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia

*eliyahacantha@unhas.ac.id¹

Article History:

Received: Mei 02, 2024;

Revised: Mei 14, 2024;

Accepted: Mei 28, 2024;

Published: Juni 02, 2024;

Keywords: National Conference, ADAKSI, ASN Lecturers, Lecturer Welfare, Lecturer Professionalism

Abstract: The First National Congress (MUNAS) of the Indonesian Civil Servant Lecturers Alliance under the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (ADAKSI), held on May 2–4, 2025, in Jakarta, served as a pivotal moment for the consolidation and advocacy of civil servant lecturers at the national level. This event successfully formulated the organization's strategic direction, ratified its Statutes and Bylaws (AD/ART), and developed a medium-term work plan for 2025–2028. The inaugural MUNAS of ADAKSI also produced twenty strategic policy recommendations to the government, particularly concerning the welfare and professionalism of civil servant lecturers. In addition to electing the national executive board, the congress affirmed ADAKSI's role as both a strategic partner and a critical counterpart to the government in higher education reform. This article not only outlines the key outcomes of the congress but also examines the contributions and impact of strengthening the institutional position of ministerial civil servant lecturers within the national education ecosystem.

Abstrak

Pelaksanaan Musyawarah Nasional (MUNAS) Kesatu Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) pada 2–4 Mei 2025 di Jakarta menjadi momentum penting konsolidasi dan advokasi dosen aparatur sipil negara (ASN) di tingkat nasional. Kegiatan ini berhasil merumuskan arah strategis organisasi, menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta menyusun program kerja jangka menengah 2025–2028. MUNAS I ADAKSI juga menghasilkan dua puluh rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah, khususnya terkait kesejahteraan dan profesionalisme dosen ASN. Selain menetapkan kepengurusan nasional, MUNAS menegaskan peran ADAKSI sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah dalam reformasi pendidikan tinggi. Artikel ini tidak hanya mendeskripsikan gambaran hasil MUNAS tetapi juga mengulas kontribusi dan dampak penguatan posisi dosen ASN kementerian dalam ekosistem pendidikan nasional.

1. PENDAHULUAN

Dosen memiliki peran kunci dalam mewujudkan tujuan pendidikan tinggi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa berbagai tantangan dihadapi dosen sehingga berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja dan menghambat capaian kinerja. Penelitian

Sakirman (2024) menemukan bahwa dosen di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan birokrasi dan budaya institusional. Selain itu, beban administrasi, kesulitan peningkatan karier, kondisi kerja buruk dan kesejahteraan dosen yang masih jauh dari cukup merupakan tantangan-tantangan yang pada saat ini dihadapi oleh dosen perguruan tinggi di Indonesia (Indahri, 2023). Permasalahan tersebut perlu diatasi dengan implementasi solusi yang tepat. Manajemen perlu menerapkan strategi kesejahteraan pegawai, memastikan keseimbangan kehidupan kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung untuk mengatasi *burnout* (Setiawan dan Supriadi, 2024).

Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) lahir dari sebuah gerakan akar rumput yang dikenal dengan nama “Pejuang Tukin”, sebuah istilah yang mengacu pada perjuangan para dosen ASN untuk mendapatkan hak atas Tunjangan Kinerja (Tukin) yang belum direalisasikan sejak tahun 2020. Padahal Setiawan dan Supriadi (2024) menyatakan bahwa kompensasi memadai berperan penting dalam meningkatkan komitmen, kepuasan kerja, produktivitas, serta mengurangi risiko *turnover*. Ketidakjelasan pembayaran tukin memunculkan kekecewaan yang meluas di kalangan dosen ASN, khususnya di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Menurut Evrita (2025), tantangan dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan dosen yang semakin besar pada akhirnya memengaruhi kualitas pendidikan tinggi secara menyeluruh. Oleh karena itu, ADAKSI hadir tidak hanya memperjuangkan kesejahteraan tetapi profesionalisme dosen.

Dalam waktu yang cukup lama para dosen merasa hak sebagai pegawai terabaikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Roringkon, Paramata, dan Yakup (2021) menemukan bahwa tunjangan kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Selain itu, penelitian Iryani, Yulianto, dan Nurpadilah (2023) pun menunjukkan bahwa pemberian tunjangan berbasis kinerja adalah upaya peningkatan kinerja individu pegawai sehingga memberikan kepuasan kerja serta mempengaruhi pencapaian kinerja pegawai. Kekhawatiran dampak dari pelanggaran hak terhadap kepuasan kerja, komitmen, dan produktivitas dosen ASN menjadi salah satu latar belakang dari perjuangan ADAKSI melakukan gerakan kolektif untuk menyuarakan aspirasi secara lebih terstruktur dan sistematis.

Seiring berkembangnya gerakan, upaya spontan dan tersebar dari para "Pejuang Tukin" mulai diarahkan dalam satu kesatuan gerak organisasi. Transformasi ini kemudian melahirkan ADAKSI sebagai wadah resmi perjuangan dosen ASN yang tidak hanya fokus pada isu tukin, tetapi juga mengembangkan peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan, profesionalisme, dan daya tawar dosen di ruang kebijakan publik. Pembentukan ADAKSI menjadi momentum penting yang menandai pergeseran dari gerakan reaktif menuju advokasi

berbasis organisasi yang terkoordinasi, inklusif, dan berkelanjutan. Sehingga bagi ADAKSI, pelaksanaan MUNAS I ini memiliki makna historis sekaligus strategis. Sebagai organisasi yang mewadahi dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek), ADAKSI dibentuk atas dasar kebutuhan mendesak akan representasi kolektif yang memperjuangkan profesionalisme, kesejahteraan, dan peran strategis dosen dalam mendukung pembangunan pendidikan tinggi nasional (Pongtambing dan Manapa., 2025).

Artikel pengabdian ini bertujuan untuk mendokumentasikan secara sistematis pelaksanaan MUNAS I ADAKSI yang telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2 – 4 Mei 2025. Artikel ini dirancang sebagai refleksi akademik yang menggarisbawahi pentingnya peran MUNAS sebagai ruang deliberatif bagi dosen ASN untuk terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan pendidikan tinggi yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis kinerja. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memahami dinamika organisasi profesi dosen ASN sekaligus memperkuat posisi ADAKSI sebagai aktor penting dalam mendukung visi pemerintah.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pelaksanaan MUNAS I ADAKSI yang diselenggarakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 Mei 2025 di Jakarta. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian ini adalah *participatory policy design* seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Menurut De Smedt dan Borch (2022), dorongan untuk proses partisipatif dapat bersifat dari atas ke bawah, yaitu pemerintah yang menginisiasi pendekatan partisipatif dalam pembuatan kebijakan atau dari bawah ke atas, yaitu pihak-pihak tertentu berupaya memengaruhi kebijakan tertentu. MUNAS I ADAKSI mengimplementasikan dorongan proses partisipatif dari bawah ke atas di mana ADAKSI berupaya merumuskan rekomendasi yang akan menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan MUNAS I ADAKSI

1. Pendekatan Partisipatoris

Pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatoris. Tim pelaksana terlibat langsung sebagai fasilitator, narasumber, dan pengamat pada seluruh rangkaian kegiatan MUNAS. Keterlibatan aktif ini memungkinkan penggalan informasi, pengalaman, serta dinamika organisasi secara langsung dari peserta MUNAS yaitu dosen ASN dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Prasodjo (2000), pendekatan partisipatoris menempatkan objek sekaligus pelaku sehingga dapat melihat permasalahan dan mampu memecahkannya (Pongtambing et al., 2024).

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumen.

a. Observasi Partisipatif

Hasanah (2017) menyatakan bahwa observasi adalah kegiatan ilmiah empiris melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun. Pengumpulan data melalui observasi partisipatif dilaksanakan dengan cara mencatat proses persidangan, diskusi pleno, dan sidang komisi secara langsung.

b. Wawancara Semi-Terstruktur

Menurut Fadhallah (2021) wawancara merupakan komunikasi antara dua pihak atau lebih secara tatap muka di mana *interviewer* menanyakan beberapa pertanyaan kepada *interviewee* untuk mendapatkan jawaban dengan tujuan tertentu. Wawancara semi-terstruktur dilakukan kepada peserta MUNAS dan pengurus nasional ADAKSI untuk menggali pandangan terkait arah kebijakan organisasi dan kebutuhan strategis dosen ASN.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, seperti dokumen tertulis, gambar, atau hasil karya (Nilamsari, 2014). Studi dokumen pada pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara menganalisis notulen, rekomendasi hasil sidang, laporan pertanggungjawaban, dan rancangan kebijakan organisasi.

3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan tiga alur menurut (Miles et al., 2013), yaitu *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Hasil observasi,

wawancara, dan studi dokumen dipilih dan disederhanakan untuk mendapatkan informasi terkait upaya strategis peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme dosen ASN. Data kemudian disajikan ke dalam bentuk teks naratif dengan tema-tema besar seperti *penguatan kapasitas dosen ASN, elemen-elemen dasar dan strategis kelembagaan, partisipasi anggota, dan strategi advokasi kebijakan*. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan sehingga diperoleh temuan yang bersifat reflektif dan transformatif terkait struktur dan peran ADAKSI.

4. Dokumentasi Kegiatan

Seluruh kegiatan didokumentasikan melalui foto, video, serta catatan lapangan yang telah dikurasi dan disusun dalam laporan akhir. Dokumentasi ini mendukung transparansi proses dan validasi atas keterlibatan nyata dalam kegiatan MUNAS I ADAKSI.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan MUNAS I ADAKSI yang berlangsung pada 2 sampai dengan 4 Mei 2025 di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam proses konsolidasi dosen ASN di lingkungan Kemdiktisaintek. Aspirasi, arah strategis organisasi, serta dasar legal-formal bagi keberlanjutan gerakan kolektif dosen ASN dalam memperjuangkan kesejahteraan dan peran strategisnya di dalam sistem pendidikan tinggi nasional dapat dihasilkan melalui kegiatan ini.

1. Penguatan Kapasitas Dosen ASN

MUNAS I ADAKSI dibuka secara resmi oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Brian Yulianto, Ph.D, pada tanggal 2 Mei 2025 di Gedung D, Graha Diktisaintek, Jakarta. Penguatan kapasitas dosen disampaikan dalam materi beliau dengan menyampaikan penghargaan atas kontribusi dosen dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Selain itu, beliau menegaskan posisi strategis dosen ASN sebagai tulang punggung pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi nasional.



Gambar 2. Menteri Memberikan *Studium Generale*

2. Elemen-Elemen Dasar dan Strategis Kelembagaan

Keberhasilan suatu program merupakan resultan interaksi elemen-elemen dengan strategi yang diterapkan (Suradisastra, 2016). Oleh karena itu, pada tanggal 3 sampai 4 Mei 2025, peserta MUNAS I ADAKSI mengikuti persidangan yang dilaksanakan di hotel Horison Balairung, Jakarta. Persidangan menghasilkan sejumlah keputusan penting sebagai berikut.

a. Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) disusun oleh komisi AD/ART sebelum disahkan dalam persidangan. Selanjutnya, AD/ART menjadi kerangka hukum ADAKSI.

b. Penyusunan Program Kerja Nasional DPP ADAKSI 2025-2028

Usulan program kerja disusun oleh komisi sebelum disahkan pada persidangan. Program Kerja Nasional DPP ADAKSI 2025-2028 terdiri dari agenda prioritas seperti peningkatan profesionalisme dosen, penguatan kapasitas riset, serta reformasi sistem insentif kinerja.

c. Penetapan Ketua Umum ADAKSI

Hasil sidang menetapkan Dr. Fatimah, S.Si., M.P. (Dosen Politeknik Negeri Tanah Laut) sebagai Ketua Umum ADAKSI untuk periode pertama.

d. Penetapan Ketentan Mars dan Hymne

Mars dan hymne didiskusikan oleh komisi Mars dan Hymne. Selanjutnya, komisi tersebut menciptakan Mars dan Hymne yang akan digunakan ADAKSI.

3. Partisipasi Anggota

MUNAS I tidak hanya menjadi forum formal pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi simbol konsolidasi nasional gerakan dosen akar rumput. Para dosen ASN dari berbagai

penjuru Indonesia menunjukkan komitmen kolektif untuk bersatu dalam memperjuangkan hak-haknya melalui jalur organisasi yang sah dan terstruktur. Hal ini menjadi bukti bahwa partisipasi dosen dalam pembangunan pendidikan tinggi tidak semata-mata berada pada tataran akademik tetapi juga pada aspek sosial-politik yang strategis.



Gambar 3. Kehadiran Peserta dalam MUNAS I ADAKSI

MUNAS secara eksplisit menegaskan posisi ADAKSI sebagai mitra strategis maupun mitra kritis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi. ADAKSI ini menyatakan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam advokasi kebijakan berbasis bukti, menumbuhkan ekosistem akademik yang mendukung inovasi dan kolaborasi, serta mendorong penyetaraan secara adil sistem penghargaan dan tunjangan dosen di seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Menurut Harini dan Septiansyah (2019), manajemen keanggotaan, motivasi anggota, dan partisipasi anggota secara simultan maupun secara parsial mempengaruhi keberhasilan lembaga.

4. Strategi Advokasi Kebijakan

Isu kesejahteraan dosen ASN menjadi fokus sentral MUNAS, terutama menyangkut hak atas tunjangan kinerja dan perlakuan administratif yang adil. Para peserta menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan dosen merupakan prasyarat untuk memperkuat daya saing institusi pendidikan tinggi. Dalam diskusi-diskusi komisi, muncul konsensus bahwa negara perlu menyediakan ruang dialog setara dan responsif terhadap kebutuhan dosen ASN yang selama ini belum optimal terdengar dalam proses penyusunan kebijakan.

Dalam kegiatan MUNAS I ADAKSI, komisi rekomendasi menyusun usulan-usulan

sebelum persidangan. Berdasarkan hasil persidangan, terdapat dua puluh rekomendasi strategis kepada pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang disepakati bersama. Rekomendasi strategis yang perlu segera ditindaklanjuti antara lain akses beasiswa lanjut usia bagi dosen ASN dengan usia di atas 45 tahun serta kenaikan pangkat yang tidak dipersulit secara birokratis dan administratif. Strategi advokasi kebijakan yang dilakukan ADAKSI berdasarkan MUNAS I selaras dengan pernyataan Pratiwi (2019) bahwa strategi advokasi kebijakan publik pada prinsipnya dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan untuk mendorong terjadinya perubahan kebijakan publik yang dinilai merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

4. KESIMPULAN

Penguatan kapasitas dosen ASN dalam MUNAS I ADAKSI terlaksana dengan penyampaian materi oleh Prof. Brian Yulianto, Ph.D. Hasil MUNAS I ADAKSI menunjukkan kematangan organisasi dalam menjalankan fungsi representasi, advokasi, dan transformasi kebijakan dengan terbentuknya elemen-elemen dasar dan strategis kelembagaan. Pelibatan aktif para anggota dalam forum ini menandai terbentuknya solidaritas profesional yang kuat di antara dosen ASN. Selain itu, penegasan posisi ADAKSI mitra strategis maupun mitra kritis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan menunjukkan komitmen bersama untuk berpartisipasi aktif. Kegiatan ini juga memperlihatkan bagaimana organisasi profesi dapat berperan dalam advokasi kebijakan sehingga menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik dalam ekosistem pendidikan tinggi Indonesia. Selain itu, ADAKSI mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap suara konstituennya di tingkat akar rumput.

5. PENGAKUAN

Segenap panitia pelaksana MUNAS I ADAKSI menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini. Terutama kepada para anggota *Steering Committee (SC)* dan *Organizing Committee (OC)* yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi, penuh tanggung jawab, dan semangat kolaboratif demi terselenggaranya forum nasional ini dengan lancar dan bermakna.

6. DAFTAR REFERENSI

- De Smedt, P., & Borch, K. (2021). Participatory policy design in system innovation. *Policy Design and Practice*, 5(1), 51–65. <https://doi.org/10.1080/25741292.2021.1887592>
- Evrita, R. E. H. (2025). Merajut harapan: Meneliti dilema tunjangan kinerja dosen di era Permendikbud No. 44 Tahun 2024. *Pro Film Jurnal*, 4(1), 153–169. <https://doi.org/10.56849/0y19xc87>
- Fadhallah, R. A. (2021). *Wawancara*. UNJ Press.
- Harini, S., & Septiansyah, A. (2019). PENGARUH MOTIVASI ANGGOTA, MANAJEMEN KEANGGOTAAN, DAN PARTISIPASI ANGGOTA TERHADAP KEBERHASILAN USAHA KOPERASI WANITA DI KABUPATEN SUBANG. *Jurnal Visionida*, 5(1), 17–31. <https://doi.org/10.30997/jvs.v5i1.1803>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-taqaddum*, 8(1), 21-46.
- Indahri, Y. (2023). Perjuangan hak dan kepentingan profesi dosen. *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat*, 15(9/I), 1–6. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XV-9-I-P3DI-Mei-2023-201.pdf
- Iryani, I., Yulianto, H., & Nurpadilah, L. (2023). Pengaruh tunjangan kinerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. *Jurnal Sejarah Ekonomi dan Manajemen (SeJaMan)*, 5(1), 32–42. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1651>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2013). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 13(2), 177-181.
- Pongtambing, Yulita Sirinti, and Esther Sanda Manapa. "ADAKSI sebagai Gerakan Kesejahteraan Dosen ASN Indonesia: Narrative Inquiry." *Intellektika: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 3 (2025): 26–36.
- Pongtambing, Yulita Sirinti, Esther Sanda Manapa, Felycitae Ekalaya Appa, Septaria Yolan Kalalinggi, dan Eliyah Acantha Manapa Sampetoding. "Sosialisasi Terkait Peran Organisasi Pemuda dalam Mendukung Pencapaian SDGs di Indonesia." *Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 31–38.
- Prasodjo, T. (2000). Pendekatan Partisipatoris Dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologis Dan Kemungkinan Penerapannya Di Kawasan Arkeologis Gunung Kidul. *Berkala Arkeologi*, 20(1), 151–162.
- Pratiwi, C. S. (2019). *Membangun strategi advokasi kebijakan publik yang progresif dan massive untuk memenuhi HAM warga negara*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3310867>
- Roringkon, Y. D., Paramata, M. R., & Yakup, Y. (2021). Pengaruh disiplin kerja dan kenaikan tunjangan kinerja terhadap kepuasan kerja serta dampaknya bagi kinerja aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan peradilan wilayah Propinsi Gorontalo. *Gorontalo Management Research*, 4(2), 79-90.
- Sakirman, S. (2024). Urgensi Jaminan Perlindungan Hukum bagi Dosen dalam Mendorong

Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. *Mandalika Law and Justice Review*, 1(01), 15-23.

Setiawan, D. A., & Supriadi, Y. N. (2024). Analisis Peran Mediasi Kepuasan Kerja Pada Jabatan Fungsional Dosen ASN PPPK di Perguruan Tinggi Negeri X. *Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 25-44.

Suradisastra, K. (2016). Strategi pemberdayaan kelembagaan petani. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26(2), 82–91.